

**KEKERASAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA**

**(Studi di Kabupaten Ponorogo)**

**JURNAL ILMIAH**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat-Syarat Memperoleh Gelar  
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**ARDY YUDISTIRA**

**NIM. 115010107113059**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2015**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Judul Jurnal Ilmiah : Kekerasan Terhadap Pelaku Tindak Pidana  
(Stud Di Kabupaten Ponorogo)**

**Identitas Penulis :  
Nama : Ardy Yudistira  
NIM : 115010107113059  
Konsentrasi : Hukum Pidana  
Jangka waktu Penelitian : 6 Bulan**

Disetujui pada tanggal :

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana

Pembimbing

Eny Harjati, SH. M.Hum  
NIP. 19590406 198601 2 001

Alfons Zakaria, S.H., LL.M  
NIP. 19800629 200501 1 002

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**KEKERASAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA**  
**(Studi Di Kabupaten Ponorogo)**

**Oleh :**

**ARDY YUDISTIRA**

**115010107113059**

Jurnal Ilmiah ini telah disahkan oleh majelis penguji pada tanggal :

Ketua Majelis

Anggota

Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya SH., MS.  
 NIP. 19540925 198003 1 002

Dr. Nurini Aprilianda SH., M.Hum.  
 NIP. 19760429 200212 2 001

Anggota

Anggota

Abdul Madjid, SH., MHum.  
 NIP. 19590126 198701 1 002

Eny Harjati, SH., M.Hum.  
 NIP. 19590406 198601 2 001

Ketua Bagian Hukum Pidana

Anggota

Eny Harjati, SH., M.Hum.  
 NIP. 19590406 198601 2 001

Alfons Zakaria, SH. LLM.  
 NIP. 19800629 200501 1 002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Rachmat Syafa'at, SH. M.Si  
 NIP. 19620805 198802 1 001

## **KEKERASAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA (STUDI DI KABUPATEN PONOROGO)**

ARDY YUDISTIRA,

Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang

email : tajoeg.tajog.78@gmail.com

### **ABSTRAK**

Dalam penulisan skripsi ini dibahas tentang kekerasan terhadap pelaku tindak pidana.

Permasalahan yang terjadi karena terdapatnya beberapa kasus kekerasan terhadap pelaku tindak pidana yang terjadi Kabupaten Ponorogo tepatnya di Desa Pintu, Desa Sedah, Desa Suren dan Desa Gandu Kepuh. Pada dasarnya kekerasan terhadap pelaku tindak pidana tidak patut untuk dilakukan karena tindakan tersebut akan mengurangi rasa kemanusiaan dan keadilan, selain itu dalam suatu peraturan perundang-undangan pun juga sudah dijelaskan, serta terdapat sanksi pidana bagi orang yang melanggarnya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis alasan orang melakukan kekerasan terhadap pelaku tindak pidana, kendala yang dihadapi penyidik dalam menangani kasus kekerasan terhadap pelaku tindak pidana dan upaya untuk mengatasi kendala dalam menangani kasus kekerasan terhadap pelaku tindak pidana

Alasan orang melakukan kekerasan terhadap pelaku tindak pidana dikarenakan adanya perasaan kesal terhadap pelaku tindak pidana, adanya pengaruh oleh orang lain yang juga melakukan kekerasan, kekerasan dianggap merupakan suatu sanksi yang tepat, kurangnya pemahaman hukum bahwa kekerasan yang dilakukan merupakan suatu tindak, sanksi yang diberikan pengadilan tidak memberikan efek jera. Dalam menangani kasus kekerasan terhadap pelaku tindak pidana terdapat beberapa kendala, dari kendala internal yaitu kurangnya jumlah personil dalam melakukan penyidikan, terbatasnya kapasitas ruang tahanan yang tersedia, kurangnya informasi tentang pelaku yang melakukan kekerasan, tidak adanya laporan dari korban kekerasan, Hambatan eksternal yaitu munculnya protes dari masyarakat. Upaya yang dilakukan penyidik untuk mengatasi kendala eksternal yang dilakukan penyidik adalah berkoordinasi dengan kepala satuan reskrim untuk menambahkan jumlah personil dalam melakukan penyidikan, menitipkan tersangka yang melakukan kekerasan di ruang tahanan polsek-polsek di kabupaten ponorogo, berkoordinasi dengan satuan intelejen dan keamanan, satuan bina masyarakat dan satuan samapta bhayangkara, menawarkan kepada pelaku untuk mengajukan laporan terkait perilaku yang telah dialami. Upaya yang dilakukan penyidik untuk mengatasi kendala internal dengan memberikan sosialisasi hukum pada pelaku kekerasan.

Kata Kunci : Kekerasan, Pelaku Tindak Pidana

## **ACTORS VIOLENCE AGAINST CRIME (STUDIES IN THE DISTRICT PONOROGO)**

Ardy Yudhisthira

Faculty of Law, Brawijaya University Malang

email: tajog.tajog.78@gmail.com

### **ABSTRACT**

In writing this essay discussed about violence against perpetrators of criminal acts.

Problems that occur because of the presence of several cases of violence against the perpetrators of criminal acts that occurred Ponorogo precisely in the Pintu Village, Sedah Village, Suren village and Gandu Kepuh village. Basically violence against the perpetrators of criminal acts inappropriate to do because such action would reduce the sense of humanity and justice, in addition to a legislation was also already described, and there are criminal sanctions for those who break them.

The purpose of this study was to determine and analyze the reasons people commit violence against the perpetrators of criminal acts, the constraints faced by investigators in handling cases of violence against the perpetrators of criminal acts and attempt to resolve constraints in handling cases of violence against criminals

The reason people do violence to criminal due to irritation of the perpetrators of criminal acts, their influence by others who also do violence, violence is considered to be an appropriate sanction, the lack of legal understanding that violence committed an offense, the court granted sanction does not provide a deterrent effect. In handling cases of violence against criminal offenders there are some constraints, internal constraints are insufficient numbers of personnel in conducting the investigation, the limited capacity of the detention space available, the lack of information about the perpetrators of the violence, the absence of reports of victims of violence, namely the emergence of external barriers protests from the public. Efforts are being made to overcome external constraints investigators what investigators are coordinating with the head unit reskrim to add the number of personnel in conducting the investigation, the suspect left the violence in the detention room at the district police station, police station ponorogo, in coordination with intelligence and security units, units of building society and unit Samapta bhayangkara, offer to the offender to submit the related reports of behavior that has been experienced. Efforts are being made to overcome internal investigators by providing socialization law on the perpetrators of violence.

Keywords: Violence, Crime Actors

## A. Latar Belakang

Hukum dalam arti luas meliputi keseluruhan aturan normatif yang mengatur dan menjadi pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan didukung oleh sistem sanksi tertentu terhadap setiap penyimpangan terhadapnya.<sup>1</sup> Setiap pelanggar peraturan hukum yang sudah ada, nantinya dikenakan sanksi yang berupa hukuman sebagai reaksi atas perbuatan yang dilakukan. Untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum itu dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat, maka peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan dari masyarakat tersebut. Dengan demikian, hukum itu bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukuman itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat.<sup>2</sup>

Sebagian masyarakat memandang bahwa penegakan hukum dalam rangka mewujudkan keadilan belum ditegakkan hal tersebut dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang masih melakukan kekerasan terhadap pelaku kejahatan dengan bentuk main hakim sendiri hal tersebut dilakukan oleh masyarakat dikarenakan merupakan bentuk sanksi yang diberikan masyarakat terhadap pelaku kejahatan sebelum pemberian sanksi sebenarnya oleh hukum. Dalam Kabupaten Ponorogo masih terdapat beberapa kasus kekerasan yang dilakukan masyarakat terhadap para pelaku tindak pidana, kasus tersebut diantaranya terjadi di Desa Pintu terjadi pada tanggal 11 Januari 2015, Desa Sedah terjadi pada tanggal 7 September 2014, Desa Suren terjadi pada tanggal 8 Januari 2013.

Pada dasarnya perilaku masyarakat yang melakukan kekerasan terhadap pelaku tindak pidana pada dasarnya tidak patut untuk dilakukan karena bertentangan dengan hak asasi manusia serta merupakan bentuk penyiksaan fisik. Berdasarkan pasal 28G ayat (2) dan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa: Penjelasan Pasal 28G ayat

---

<sup>1</sup> Muhammad Shiddiq Tgk Armia, **Perkembangan Pemikiran Dalam Ilmu Hukum**, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, hlm 77

<sup>2</sup> C.S.T. Kansil, **Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm 40.

(2) menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari Negara lain.” Sedangkan penjelasan dalam Pasal 28I ayat (1) menyatakan bahwa: “hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”

Selain didalam Undang-Undang Dasar 1945 didalam Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga telah termuat suatu aturan bahwa setiap orang berhak bebas dari kekerasan hal tersebut tercantum pada pasal 33 ayat 1 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.” Didalam pengaturan pengaturan Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP) juga sudah ada pengaturan sanksi tentang orang yang melakukan kekerasan, pengaturan sanksi tersebut terdapat pada pasal 170 dan 351. Aksi kekerasan yang dilakukan masyarakat dalam bentuk main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan atau pelaku tindak pidana pada dasarnya tidak patut untuk dilakukan karena tindakan tersebut akan mengurangi rasa kemanusiaan dan keadilan. Karena sebenarnya dalam hukum sudah terdapat tentang pengaturan sanksi yang berupa denda dan kurungan bagi pelaku yang melanggar hukum tersebut akan tetapi masyarakat mengindahkan hukum yang sudah ada dan aksi kekerasan sampai saat ini pun masih dapat dijumpai disekitar kita tanpa kita sadari.

## **B. Rumusan Permasalahan**

Dengan adanya beberapa kasus kekerasan terhadap pelaku tindak pidana yang terjadi di Kabupaten Ponorogo seperti yang telah disebutkan pada latar belakang, muncul beberapa pertanyaan yang dijadikan sebagai perumusan masalah yaitu:

1. Apakah alasan orang melakukan kekerasan terhadap pelaku tindak pidana ?
2. Apakah kendala yang dihadapi penyidik dalam menangani kasus kekerasan terhadap pelaku tindak pidana ?
3. Apakah upaya untuk mengatasi kendala yang dilakukan penyidik dalam menangani kasus kekerasan terhadap pelaku tindak pidana ?

### C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Yuridis empiris yaitu suatu metode pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat.<sup>3</sup> Sedangkan Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah menggunakan metode pendekatan yuridis Kriminologis yaitu dengan cara melakukan pengumpulan data berkaitan dengan fakta-fakta serta alasan-alasan mengapa orang melakukan kekerasan terhadap pelaku tindak pidana yang terjadi di Kabupaten Ponorogo. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>4</sup> Data ini diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan kepada penyidik Satreskrim yang diantaranya adalah Brigadir Dwi Arianto, Briptu Agung Wicaksono, Aiptu Mulyono, Aipda Choirul serta masyarakat yang melakukan kekerasan yang diantaranya adalah Bowo warga dari Desa Pintu, Hadi dari warga Desa Pintu, Sumono warga dari Desa Pintu, Kunto warga dari Desa Sedah, Sarwani warga dari Desa Sedah, Mukhlis warga dari Desa Sedah, Sutrisno dari Desa Suren, Nursamsi warga dari Desa Suren, Agung warga dari Gandu Kepuh.

Data sekunder adalah data penunjang dari data primer yang berasal dari buku, literatur yang terkait dengan objek penelitian, data sekunder dari penelitian ini adalah data-data atau masukan-masukan disekitar masalah objek yang dikaji dengan melalui penelitian yang bersumber pada literatur, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain yang ada hubungannya dengan masalah

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Ui-Pres, Jakarta, 2010, hlm 42

<sup>4</sup> Amiruddin, Zainal Asikin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 30



yang hendak dibahas.<sup>5</sup> Data sekunder pada penelitian ini yang terdiri dari Pasal 28G ayat 2 dan Pasal 28I ayat 1 di dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat 1 di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 53, 170, 351, 385 di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 1 angka 2 dan 5, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 ayat 1, Pasal 7 ayat 2 di dalam Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana, jurnal, makalah dan buku.

Teknik memperoleh data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, studi kepustakaan, studi di internet. Wawancara atau interview adalah teknik penelitian yang dilaksanakan dengan cara dialog baik secara langsung (tatap muka) maupun melalui saluran media tertentu antara pewawancara dengan yang diwawancarai sebagai sumber data.<sup>6</sup> Studi Kepustakaan adalah merupakan suatu studi pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik.<sup>7</sup> Studi di Internet adalah merupakan suatu studi yang dilakukan penulis untuk mencari sumber data yang berupa berita ataupun kasus yang sedang terjadi di Kabupaten Ponorogo untuk kepentingan penulis dalam melakukan penelitian.

#### **D. Pembahasan**

Kekerasan pada pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat adalah suatu fenomena yang sering ditemui dan didengar oleh semua orang. Aksi kekerasan terhadap pelaku tindak pidana biasanya sering terjadi jika pelaku tindak pidana atau kejahatan tertangkap tangan dilingkungan ramai, seperti di jalan raya, terminal, hingga perkampungan yang padat penduduk. Masyarakat yang melakukan kekerasan terhadap pelaku tindak pidana pada dasarnya dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana juga karena masyarakat yang melakukan kekerasan terhadap pelaku tindak

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat**, Rajawali Press, Jakarta, 1982, hlm. 25

<sup>6</sup> Wina Sanjaya, **Penelitian Pendidikan: Jenis, Metode dan Prosedur**, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2013, hlm 263

<sup>7</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, **Metode Penelitian Pendidikan**, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2012, hlm 221

pidana tersebut telah memenuhi beberapa unsur-unsur tindak pidana yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis di Kepolisian Resort Kabupaten Ponorogo tidak satu pun kasus kekerasan terhadap pelaku tindak pidana atau kejahatan yang tercatat. Pihak kepolisian berdalih bahwa pelaku tindak pidana maupun keluarga yang menjadi korban dari masyarakat yang melakukan pengroyokan terhadap pelaku sendiri tidak mempersoalkan atau melaporkan kejadian yang mereka alami ke pihak kepolisian. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis dimasyarakat alasan yang membuat orang melakukan kekerasan terhadap pelaku tindak pidana diantaranya adalah

- a. Adanya perasaan kesal terhadap pelaku tindak pidana.

Menurut pendapat dari Enrico Ferri dalam bukunya *Sociologia Criminale* yang mengkalsifikasikan lima kelompok penjahat yang salah satunya adalah melakukan kejahatan sebagai akibat problem mental atau keadaan emosional yang panjang serta kronis.<sup>8</sup> Perilaku masyarakat yang melakukan kekerasan pada masyarakat dikarenakan adanya factor turunan atau adanya sifat bawaan dari nenek moyang mereka untuk melakukan kejahatan, dengan cara kekerasan terhadap pelaku tindak pidana serta adanya problem mental di dalam masyarakat sendiri. Perilaku masyarakat yang kesal terhadap pelaku dan lebih memilih melakukan kekerasan terhadap pelaku dikarenakan tidak berfungsi atau tidak berjalannya suatu aturan hukum untuk mengatasi kejahatan yang terjadi dilingkungan masyarakat perilaku masyarakat tersebut sesuai dengan *Teori Anomie*.

Dalam *Teori anomie* menjelaskan bahwa untuk mempelajari suatu masyarakat adalah dengan dengan melihat ada bagian-bagaian komponennya dalam usaha mengetahui bagaimana masing-masing berhubungan satu sama lain. Dengan kata lain, kita melihat kepada struktur dari suatu masyarakat guna melihat bagaimana ia berfungsi. Jika masyarakat itu satabil, bagian-bagiannya beroperasi secara lancar, susunan-susunan social berfungsi. Masyarakat seperti itu ditandai oleh

---

<sup>8</sup> Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, **Kriminologi**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 40

kepaduan, kerja sama, dan kesepakatan. Namun jika bagian-bagian komponennya tertata dalam suatu keadaan yang membahayakan maka susunan masyarakat tersebut disebut dysfunctional.<sup>9</sup>

Berdasarkan pendekatan psikologis menurut Henry H. Goddard penyebab utama perlakuan jahat adalah terletak pada kemampuan mental yang rendah bahkan mencapai suatu limit yang disebut *feebleminded* atau penjahat potensiil, terutama yang memiliki temperament impulsive hampir dapat dipastikan untuk terlibat ke dalam kejahatan.<sup>10</sup>

- b. Adanya pengaruh oleh orang lain yang juga melakukan kekerasan terhadap pelaku tindak pidana.

Perilaku masyarakat yang mudah terpengaruh orang lain agar ikut melakukan kekerasan dikarenakan dari factor lingkungan masyarakat yang masih terdapat budaya kekerasan. Factor lingkungan dinilai paling berpengaruh dalam membentuk kepribadian dan pola berfikir dari masyarakat. Berdasarkan Teori Lingkungan memandang kriminalitas sebagai tingkah laku yang dipelajari secara biasa, normal berasaskan aturan-aturan atau hukum-hukum dari psikologi belajar.<sup>11</sup>

Sehingga dalam hal ini suatu kondisi dari lingkungan seseorang tinggal sangat berpengaruh terhadap pola berfikir seseorang dalam menentukan suatu tindakan. Apabila dalam suatu lingkungan tersebut masyarakatnya mematuhi serta memahami terhadap suatu aturan hukum maka nantinya tidak akan ada masyarakat yang terpengaruh untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap pelaku tindak pidana yang tertangkap. Akan tetapi pola berfikir dari seseorang tersebut akan berbeda serta memandang kriminalitas merupakan tingkah laku yang biasa apabila seseorang atau masyarakat tersebut tinggal dalam sebuah lingkungan yang masyarakatnya kurang memahami serta mematuhi hukum yang berlaku.

---

<sup>9</sup> Ibid., hlm 58

<sup>10</sup> G.W Bawengan , Masalah Kejahatan dengan Sebab Dan Akibat, Pradnya Paramita, Jakarta Pusat, 1977, hlm 24

<sup>11</sup> Purnianti, Moh. Kemal Darmawan, **Mazhab Dan Penggolongan Teori Dalam Kriminologi**, Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm 100

Masyarakat yang mudah terpengaruh oleh orang lain untuk melakukan kekerasan pada dasarnya mereka suka untuk melanggar hukum berdasarkan Teori Tegang beranggapan bahwa manusia pada dasarnya makhluk yang selalu memperkosa hukum atau melanggar hukum, norma-norma dan peraturan-perturan setelah terputusnya antara tujuan sertacara mencapainya menjadi demikian besar sehingga satu-satunya cara untuk mencapai tujuan ini dengan melalui saluran yang tidak legal.<sup>12</sup>

Menurut mulyana W. Kusumah bahwa aspek kultur dan struktur masyarakat dapat menjelaskan lahirnya kejahatan kekerasan sebagai berikut: Sumber-sumber kulutral dari kejahatan dengan kekerasan terletak pada berseminya sub-kebudayaan kekerasan yang antara lain merupakan nila-nilai dan norma-norma yang mendukung pola perilaku kekerasan di mana respon-respon yang secara fisik agresif diharapkan, bahkan dibutuhkan oleh kelompok social pendukung sub-kebudayaan kekerasan ini diperkuat oleh reaksi terhadapnya, baik dari masyarakat maupun dari mereka yang mempunyai monopoli atas kekerasan yang sah seeperti pelaksana penegakan hukum. Penggunaan kekerasan dianggap sebagai bagian hidup dan sebagai alternatif penyelesaian konflik yang cepat.<sup>13</sup>

Menurut M. Wolfgang dan F.Ferracuti (*The Sub-culture of Violence, Towards An Integrated Theory in Criminology*), dalam menelaah kejahatan-kejahatan dengan kekerasan ini dapat diketengahkan dua preposisi:<sup>14</sup>

- 1) Norma-norma yang mengizinkan dan mendukung kekerasan sebelumnya telah terdapat dalam lingkungan si pelanggar hukum sendiri.
- 2) Banyak pelanggar hukum yang menghayati dan dipengaruhi oleh norma-norma-norma tersebut.

---

<sup>12</sup> Soedjono Dirdjosisworo, op. cit. hlm 113

<sup>13</sup> Adhi Wibowo, **Perlindungan Hukum Korban Amuk Masa Suatu Tinjauan Viktimologi**, Thafa Media, Yogyakarta, 2013, hlm 19

<sup>14</sup> Mulyana W. Kusuma, **Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm 42

c. Kekerasan dianggap merupakan suatu sanksi yang tepat

Anggapan dalam dalam suatu masyarakat bahwa pelaku tindak pidana pantas diberikan sanksi dalam bentuk kekerasan dikarenakan tidak berfungsi atau tidak berjalannya suatu aturan hukum yang dapat memberikan sanksi bagi pelaku yang melanggarnya serta untuk mengatasi kejahatan yang terjadi dilingkungan masyarakat perilaku masyarakat tersebut sesuai dengan *Teori Anomi*.

Dalam *Teori Anomi* menjelaskan bahwa untuk mempelajari suatu masyarakat adalah dengan melihat ada bagian-bagaian komponennya dalam usaha mengetahui bagaimana masing-masing berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Dengan kata lain, kita melihat kepada struktur dari suatu masyarakat guna melihat bagaimana ia berfungsi. Jika masyarakat itu satabil, bagian-bagiannya beroperasi secara lancar, susunan-susunan social berfungsi. Masyarakat seperti itu ditandai oleh kepaduan, kerja sama, dan kesepakatan. Namun jika bagian-bagian komponennya tertata dalam suatau keadaan yang membahayakan maka susunan masyarakat tersebut disebut dysfunctional.<sup>15</sup>

Dengan tidak berjalannya suatu aturan hukum untuk memberikan sanksi bagi pelaku tersebut sehinga membuat masyarakat mempunyai suatu pandangan sendiri-sendiri terhadap hukuman bagi pelaku tindak pidana dan kurang mempercayai sanksi hukum yang berlaku hal tersebut sesuai dengan *Teori Culture Conflict* yang menjelaskan bahwa setiap kelompok memiliki *conduct norms* sendiri (aturan yang mengatur tingkah laku) dan bahwa *conduct norms* dari satu kelompok mungkin akan bertentangan dengan *conduct norms* lainnya.<sup>16</sup> Anggapan masyarakat yang memandang bahwa kekerasan merupakan sanksi yang tepat bagi pelaku tindak pidana, juga tidak terlepas dari peran lingkungan yang mempengaruhi pola pikir masyarakat serta perilaku masyarakat dalam melakukan tindakan hal ini sesuai dengan teori Lingkungan yang memandang kriminalitas sebagai tingkah laku yang dipelajari secara biasa,

<sup>15</sup> Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, loc. cit. hlm 58

<sup>16</sup> Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, loc. cit. hlm 79

normal berasaskan aturan-aturan atau hukum-hukum dari psikologi belajar.<sup>17</sup>

- d. Kurangnya pemahaman hukum bahwa kekerasan yang dilakukan merupakan suatu tindak pidana.

Perilaku masyarakat yang kurang memahami hukum dan belum sadar bahwa kekerasan terhadap pelaku tindak pidana merupakan perbuatan tindak pidana dikarenakan dari factor lingkungan sendiri yang masih terdapat budaya kekerasan dalam mengatasi suatu masalah yang terjadi. Karena berdasarkan Teori Lingkungan memandang kriminalitas sebagai tingkah laku yang dipelajari secara biasa, normal berasaskan aturan-aturan atau hukum-hukum dari psikologi belajar.<sup>18</sup>

Budaya kekerasan yang terdapat dalam suatu masyarakat tersebut menjadikan suatu kebiasaan serta menjadikannya sebagai suatu peraturan atau norma yang tidak tertulis dan telah dipahami oleh masyarakat sendiri untuk mengatasi suatu permasalahan kejahatan yang terjadi. Berdasarkan Teori *Culture Conflict* menjelaskan bahwa setiap kelompok memiliki *conduct norms*-nya sendiri dan bahwa *conduct norms* dari satu kelompok mungkin bertentangan dengan *conduct norms* lainnya.<sup>19</sup>

Dengan adanya norma yang mendukung masyarakat untuk melakukan kekerasan sebagai jalan mengatasi suatu permasalahan kejahatan yang sering terjadi menjadikan masyarakat kurang sadar terhadap hukum yang sudah ada karena masyarakat yang menganut norma tersebut percaya bahwa suatu norma tersebut dapat mengatasi permasalahan kejahatan yang sering terjadi, meskipun masyarakat yang lainnya kurang percaya dan menganggap bahwa norma tidak tertulis tersebut bertentangan dengan hukum yang sudah ada.

Hukum yang efektif sebagai alat untuk mengubah masyarakat, hendaklah didalam proses pembuatannya memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu sehingga betul-betul masyarakat tersebut dapat merasakan keterlibatannya secara baik. Hukum sebagai alat atau sarana

---

<sup>17</sup> Purnianti, Moh. Kemal Darmawan, loc. cit. hlm 100

<sup>18</sup> Purnianti, Moh. Kemal Darmawan, loc. cit. hlm 100

<sup>19</sup> Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, loc. cit. hlm 79

untuk mengubah suatu masyarakat, maka dalam hal ini janganlah mengurangi asas-asas keadilan.<sup>20</sup> Ada dua fungsi yang dapat dijalankan oleh hukum di dalam masyarakat, yaitu pertama sebagai sarana control social dan kedua sebagai sarana untuk melakukan “*social engineering*” sebagai sarana kontrol social maka hukum bertugas untuk menjaga agar masyarakat tetap dapat berada di dalam pola-pola tingkah laku yang diterima olehnya.

Oleh karena didalam proses *social engineering* itu sasaran-sasaran yang ingin dicapai, yaitu “menggerakkan tingkah laku atau mencapai keadaan yang dikehendaki ditentukan dengan jelas, maka cara-cara yang dipakai dan kemungkinan-kemungkinan yang dapat timbul merupakan suatu bidang pembahasan yang menarik perhatian tersendiri.<sup>21</sup> Karena berdasarkan Teori Kontrol Sosial tidak melihat individu sebagai orang yang secara intrinsik patuh pada hukum, akan tetapi menganut segi pandangan antithesis di mana orang-orang harus belajar untuk tidak melakukan tindak pidana.<sup>22</sup>

Sehingga dalam hal ini sosialisasi dan penyuluhan hukum terhadap masyarakat yang kurang kesadaran terhadap hukum perlu dilakukan karena masih banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum yang diantaranya melakukan kekerasan terhadap pelaku tindak pidana, karena pada dasarnya masyarakat yang melakukan kekerasan tersebut juga dapat dikatakan sebagai perbuatan tindak pidana yang dapat dihukum serta mencederai rasa keadilan serta kemanusiaan.

- e. Sanksi yang diberikan pengadilan dianggap tidak memberikan efek jera.

Sanksi pidana berupa Pidanaan merupakan bagian terpenting dalam hukum pidana, karena merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggung jawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. Hukum pidana tanpa pidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahan tersebut. Manfaat terbesar dengan dijatuhkannya pidana terhadap pembuat

---

<sup>20</sup> Sabian Usman, **Dasar-Dasar Sosiologi Hukum**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm 190

<sup>21</sup> Satjipto Raharjo, **Hukum dan Masyarakat**, Angkasa, Bandung, 1986, hlm 117

<sup>22</sup> Soedjono Dirdjosisworo, op. cit. hlm 119

adalah pencegahan dilakukannya tindak pidana, baik pencegahan atas pengulangan oleh pembuat, maupun pencegahan mereka yang sangat mungkin melakukan tindak pidana tersebut.<sup>23</sup> Sanksi pidana yang dirasa kurang memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana membuat masyarakat memberikan sanksi bagi pelaku tindak pidana dengan cara mereka sendiri.

Berdasarkan *Teori Anomie* yang menjelaskan bahwa dalam mempelajari suatu masyarakat adalah dengan melihat ada bagian-bagaian komponennya dalam usaha mengetahui bagaimana masing-masing berhubungan satu sama lain. Dengan kata lain, kita melihat kepada struktur dari suatu masyarakat guna melihat bagaimana ia berfungsi. Jika masyarakat itu satabil, bagian-bagiannya beroperasi seperti lancar, susunan-susunan social berfungsi. Masyarakat seperti itu ditandai oleh kepaduan, kerja sama, dan kesepakatan. Namun jika bagian-bagian komponennya tertata dalam suatu keadaan yang membahayakan maka susunan masyarakat tersebut disebut dysfunctional.<sup>24</sup>

Dengan kata lain bahwa sikap masyarakat yang memberikan sanksi kepada pelaku tersebut memandang bahwa penegakan hukum belum sepenuhnya ditegakkan karena masih banyaknya pelaku tindak pidana yang masih melakukan kejahatan, dalam hal ini peran aparat penegak hukum harus lebih baik lagi dalam menegakkan hukum sehingga nantinya masalah tentang kejahatan dapat berkurang dan masyarakat percaya terhadap penegakan hukum dan masyarakat tidak mengambil tindakan sendiri dengan melakukan kekerasan terhadap pelaku tersebut. Karena pada dasarnya masyarakat yang melakukan kekerasan terhadap pelaku tersebut juga mempunyai suatu aturan sendiri yang tidak tertulis untuk mengatasi suatu permasalahan yang terjadi meskipun suatu aturan yang tidak tertulis tersebut tidak sesuai dengan hukum yang sudah ada.

---

<sup>23</sup> Chairul Huda, **Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan**, Cetakan Ketiga, Kencana, Jakarta, 2014 hlm 129

<sup>24</sup> Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, loc. cit. hlm 58



Dalam Teori *Culture Conflict* juga menjelaskan bahwa setiap kelompok memiliki suatu normanya sendiri-sendiri dan bahwa norma dari satu kelompok mungkin bertentangan dengan norma lainnya.<sup>25</sup>

Dalam menangani kasus kekerasan terhadap pelaku tindak pidana terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh penyidik antara lain.

a. Kendala Internal:

1. Kurangnya jumlah personil dalam melakukan penyidikan

Dalam menangani kasus kekerasan terhadap pelaku tindak pidana, penyidik terkendala dalam kurangnya jumlah personil dalam melakukan penyidikan. Dikarenakan dalam menangani kasus kejahatan hanya terdapat 2 penyidik saja, sedangkan untuk menangani kasus kekerasan terhadap pelaku tindak pidana tidak cukup apabila hanya 2 penyidik saja untuk menangani kasus tersebut dikarenakan dalam menangani kasus tersebut melibatkan masyarakat yang banyak. Sedangkan dalam setiap harinya terdapat laporan masuk tentang kasus kejahatan sehingga dalam hal inipihak penyidik tidak dapat menangani kasus tersebut secara optimal. Dengan tidak optimalnya dalam menangani kasus tersebut sehingga dapat menghambat proses penyidikan.<sup>26</sup>

2. Terbatasnya kapasitas ruang tahanan yang tersedia.

Menurut keterangan dari Briptu Agung Wicaksono kapasitas ruang tahanan yang dinilai masih terbatas juga menjadikan sebuah kendala bagi penyidik dalam menangani kasus kekerasan terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat. Dikarenakan masyarakat yang melakukan kekerasan terhadap pelaku tindak pidana dalam hal ini melibatkan masyarakat yang banyak apabila masyarakat yang melakukan kekerasan terhadap pelaku nantinya ditangkap untuk kepentingan penyidikan maka kapasitas ruang tahanan tidak cukup untuk menampung masyarakat yang melakukan kekerasan terhadap pelaku dikarenakan daya

<sup>25</sup> Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, loc. cit. hlm 79

<sup>26</sup> Wawancara dengan Briptu Agung Wicaksono tanggal 11 Februari 2015

tampung ruang tahanan hanya cukup untuk menampung 10 orang saja.

Sedangankan dalam sel tahanan sendiri masih terdapat tersangka dalam hal kasus yang berbeda untuk kepentingan penyidikan, jadi apabila nantinya masyarakat yang melakukan kekerasan terhadap pelaku ditahan di ruang tahanan Polres Ponorogo maka di dalam tahanan nantinya akan berdesakan dengan tahanan lainnya.<sup>27</sup>

3. Kurangnya informasi tentang pelaku yang melakukan kekerasan.

Menurut keterangan dari Brigadir Dwi Arianto menjelaskan bahwa kendala yang dialami penyidik dalam menangani kasus kekerasan terhadap pelaku tindak pidana juga terdapat pada kurangnya informasi terhadap pelaku tindak pidana, dikarenakan pelaku yang menjadi korban kekerasan dari masyarakat sekitar kurang begitu mengenali masyarakat yang melakukan kekerasan terhadap pelaku. Selain itu masyarakat yang melihat serta mengetahui masyarakat yang ikut serta dalam melakukan kekerasan terhadap pelaku terkesan menutupi dan ingin melindungi satu sama lain agar nantinya masyarakat yang melakukan kekerasan terhadap pelaku tersebut tidak ditangkap.<sup>28</sup>

4. Tidak adanya laporan dari korban kekerasan

Menurut keterangan dari Aiptu Mulyono kendala yang dihadapi penyidik dalam menangani kasus kekerasan yang dilakukan masyarakat terhadap pelaku tindak pidana terdapat pada tidak adanya laporan dari korban kekerasan. Pelaku yang menjadi korban kekerasan yang dilakukan masyarakat terkesan tidak melaporkan kepada penyidik dikarenakan pelaku sendiri sudah merasa cukup bersalah atas perbuatan yang sudah dilakukan selain itu apabila nantinya pelaku tersebut melaporkan kekerasan yang dialami, maka nantinya tidak ada sanksi yang mau membantu untuk memberikan keterangan yang sesuai dengan yang dialami

<sup>27</sup> Wawancara dengan Briptu Agung Wicaksono tanggal 11 Februari 2015

<sup>28</sup> Wawancara dengan Brigadir Dwi Arianto tanggal 10 Februari 2015

oleh pelaku kepada pihak kepolisian bahwa pelaku tersebut telah mengalami kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat.<sup>29</sup>

b. Kendala eksternal :

Kendala eksternal yaitu munculnya protes dari masyarakat yang berada di sekitar lokasi kejadian.

Masyarakat yang melakukan protes dikarenakan adanya anggota keluarga atau masyarakat tidak terima apabila anggota keluarga atau masyarakat yang melakukan kekerasan ditangkap, karena masyarakat sendiri beranggapan bahwa pada dasarnya mereka hanya ingin membuat pelaku tindak pidana tersebut jera serta untuk membantu pihak penyidik untuk melumpuhkan pelaku agar tidak kabur.<sup>30</sup>

Berdasarkan kendala yang dihadapi penyidik dalam menangani suatu kasus kekerasan terhadap pelaku tindak pidana. Terdapat berbagai upaya dalam menangani kendala yang berasal dari internal dan eksternal.

a. Upaya untuk mengatasi kendala internal :

1. Pihak penyidik berkoordinasi dengan Kepala satuan Reskrim untuk menambahkan jumlah personil dalam melakukan penyidikan.

Dalam mengatasi kurangnya jumlah personil dalam melakukan penyidikan menurut keterangan dari Briptu Agung Wicaksono upaya untuk mengatasi kendala dalam menangani kasus kekerasan terhadap pelaku, terkait kurangnya jumlah personil untuk melakukan penyidikan maka dalam hal ini pihak penyidik berkoordinasi dengan Kepala Satuan Reskrim untuk menambahkan jumlah personil dalam melakukan penyidikan. Dikarenakan dalam menangani kasus kejahatan hanya terdapat 2 penyidik saja, sedangkan untuk menangani kasus kekerasan terhadap pelaku tindak pidana tidak cukup apabila hanya 2

---

<sup>29</sup> Wawancara dengan Aiptu Mulyono pada tanggal 18 Februari 2015

<sup>30</sup> Wawancara dengan Brigadir Dwi Arianto tanggal 10 Februari 2015

penyidik saja untuk menangani kasus tersebut dikarenakan dalam menangani kasus tersebut melibatkan masyarakat yang banyak.

Koordinasi tersebut diharapkan nantinya dapat menambah jumlah penyidik yang sebelumnya 2 menjadi 6 penyidik untuk menangani kasus kekerasan terhadap pelaku tindak pidana. Sehingga nantinya kinerja penyidik untuk menangani kasus kekerasan terhadap pelaku tindak pidana dapat optimal serta cepat dalam proses penyidikann.<sup>31</sup>

2. Penyidik menitipkan tersangka yang melakukan kekerasan terhadap pelaku di ruang tahanan polsek-polsek yang ada di Kabupaten Ponorogo.

Untuk mengatasi kendala terbatasnya kapasitas ruang tahanan yang tersedia menurut keterangan dari Briptu Agung Wicaksono, upaya untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan menitipkan tersangka yang melakukan kekerasan terhadap pelaku di ruang tahanan polsek-polsek yang ada di Kabupaten Ponorogo. Dikarenakan dalam menangani kasus kekerasan terhadap pelaku tindak pidana melibatkan tersangka yang tidak sedikit. Selain itu kapasitas daya tampung ruang tahanan juga dinilai masih terbatas dikarenakan daya tampung ruang tahanan hanya cukup untuk menampung 10 orang saja. Sedangankan dalam sel tahanan sendiri masih terdapat tersangka dalam hal kasus yang berbeda untuk kepentingan penyidikan, jadi apabila nantinya masyarakat yang melakukan kekerasan terhadap pelaku tindak pidana ditahan di ruang tahanan Polres Ponorogo maka nantinya di dalam tahananakan terbatas ruang geraknya serta berdesakan dengan tahanan lainnya. Upaya tersebut diambil guna kepentingan penyidikan supaya nantinya mendapatkan keterangan yang sesuai dengan kejadian serta mengantisipasi tersangka yang melarikan diri dikarenakan telah melakukan kekerasan terhadap pelaku.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Wawancara dengan Briptu Agung Wicaksono tanggal 11 Februari 2015

<sup>32</sup> Wawancara dengan Briptu Agung Wicaksono tanggal 11 Februari 2015

3. Penyidik berupaya berkoordinasi dengan satuan intelejen dan keamanan, satuan bina masyarakat serta satuan samapta bhayangkara.

Dalam mengatasi kurangnya informasi tentang pelaku yang melakukan kekerasan berdasarkan keterangan dari Brigadir Dwi Arianto upaya mengatasi kendala tersebut adalah dengan berkoordinasi dengan satuan intelejen dan keamanan, satuan bina masyarakat serta satuan samapta bhayangkara, koordinasi tersebut dilakukan karena pelaku yang menjadi korban kekerasan dari masyarakat sekitar kurang begitu mengenali masyarakat yang melakukan kekerasan terhadap pelaku. Sehingga dalam hal ini pihak penyidik cukup kesulitan untuk menentukan tersangka yang melakukan kekerasan terhadap pelaku. Kurangnya informasi tersebut tidak hanya dari pelaku yang kurang mengenali masyarakat yang melakukan kekerasan, akan tetapi informasi yang berasal dari masyarakat yang berada di sekitar lokasi kejadian juga tidak memberikan keterangan tentang siapa saja masyarakat yang melakukan kekerasan terhadap pelaku. Dikarenakan masyarakat tidak memberikan informasi siapa saja masyarakat yang telah melakukan kekerasan serta masyarakat terkesan menutupi dan melindungi satu sama lain agar tidak ada masyarakat yang tertangkap. Koordinasi tersebut nantinya diharapkan dapat menemukan tersangka yang melakukan kekerasan terhadap pelaku sehingga nantinya tersangka yang melakukan kekerasan terhadap pelaku tindak pidana dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.<sup>33</sup>

4. Penyidik berupaya untuk menawarkan kepada pelaku untuk mengajukan pengaduan terkait perilaku yang telah dialami.

Dalam hal tidak adanya laporan dari korban kekerasan menurut keterangan dari Aiptu Mulyono pihak penyidik dalam hal ini berupaya untuk menawarkan kepada pelaku tindak pidana yang menjadi korban kekerasan apakah akan mengajukan pengaduan

---

<sup>33</sup> Wawancara dengan Brigadir Dwi Arianto tanggal 10 Februari 2015

terkait perilaku yang telah dialami. Apabila pelaku melakukan pengaduan maka dari pihak penyidik pun akan memproses pengaduan tersebut sesuai dengan Pasal 108 ayat 1 KUHAP. Dalam Pasal 108 ayat 1 KUHAP menjelaskan bahwa setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis.<sup>34</sup>

- b. Upaya untuk mengatasi kendala eksternal terkait munculnya protes dari masyarakat sekitar lokasi kejadian apabila orang-orang yang melakukan kekerasan terhadap pelaku ditangkap oleh pihak penyidik, maka pihak penyidik dalam hal ini berupaya untuk melakukan sosialisasi hukum terhadap masyarakat sekitar lokasi kejadian bahwa kekerasan yang dilakukan orang-orang terhadap pelaku merupakan perbuatan tindak pidana dan dapat dikenakan sanksi pidana. Sehingga nantinya masyarakat akan dapat mengerti dan mulai memahami bahwa kekerasan terhadap pelaku tindak pidana adalah perbuatan yang salah serta dapat dikenakan sanksi pidana. Karena pada dasarnya kekerasan yang dilakukan masyarakat terhadap pelaku sangat bertentangan dengan Hak Asasi Manusia serta pelaku juga mempunyai hak yaitu diperlakukan sama di depan hukum dan tidak boleh dihakimi sewenang-wenang oleh masyarakat.<sup>35</sup>

## **E. Penutup**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dijelaskan, maka pada akhir bab ini dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan orang melakukan kekerasan terhadap pelaku tindak pidana adalah:
  - a. Adanya perasaan kesal terhadap pelaku tindak pidana.
  - b. Adanya pengaruh oleh orang lain yang juga melakukan kekerasan terhadap pelaku tindak pidana.
  - c. Kekerasan dianggap merupakan suatu sanksi yang tepat.

---

<sup>34</sup> Wawancara dengan Aiptu Mulyono pada tanggal 18 Februari 2015

<sup>35</sup> Wawancara dengan Brigadir Dwi Arianto tanggal 10 Februari 2015

- d. Kurangnya pemahaman hukum bahwa kekerasan yang dilakukan merupakan suatu tindak pidana.
  - e. Sanksi yang diberikan pengadilan dianggap tidak memberikan efek jera.
2. Kendala yang dihadapi penyidik dalam menangani kasus kekerasan terhadap pelaku tindak pidana adalah sebagai berikut:
- a. Kendala internal dalam menangani kasus kekerasan terhadap pelaku tindak pidana antara lain:
    - 1) Kurangnya jumlah personil dalam melakukan penyidikan.
    - 2) Terbatasnya kapasitas ruang tahanan yang tersedia.
    - 3) Kurangnya informasi tentang pelaku yang melakukan kekerasan
    - 4) Tidak adanya laporan dari korban kekerasan.
  - b. Kendala eksternal dalam menangani kasus kekerasan terhadap pelaku tindak pidana adalah munculnya protes dari masyarakat dikarenakan adanya anggota keluarga atau masyarakat tidak terima apabila anggota keluarga atau masyarakat yang melakukan kekerasan ditangkap.
3. Upaya untuk mengatasi kendala yang dilakukan penyidik dalam menangani kasus kekerasan terhadap pelaku tindak pidana adalah sebagai berikut:
- a. Upaya untuk mengatasi kendala internal antara lain:
    - 1) Pihak penyidik berkordinasi dengan Kepala Satuan Reskrim untuk menambahkan jumlah personil dalam melakukan penyidikan.
    - 2) Pihak penyidik menitipkan tersangka yang melakukan kekerasan terhadap pelaku di ruang tahanan polsek-polsek yang ada di Kabupaten Ponorogo.
    - 3) Penyidik berkoordinasi dengan satuan itelejen dan keamanan, satuan bina masyarakat serta satuan samapta bhayangkara.
    - 4) Pihak penyidik berupaya untuk menawarkan kepada pelaku untuk mengajukan laporan terkait perilaku yang telah dialami.
  - b. Upaya untuk mengatsi kendala eksternal dalam menangani kasus kekerasan terhadap pelaku tindak pidana adalah dengan melakukan sosialisasi hukum terhadap masyarakat sekitar bahwa kekerasan yang

dilakukan orang-orang terhadap pelaku merupakan perbuatan tindak pidana dan dapat dikenakan sanksi pidana.

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Kepolisian Resort Ponorogo harus membangun suatu hubungan kemitraan dengan masyarakat terutama, kepada Tokoh Masyarakat, kepala Desa, pak Camat dalam bentuk kegiatan penyuluhan hukum serta kegiatan lainnya yang dapat menciptakan keakraban serta kesadaran hukum yang lebih baik antara Kepolisian dengan masyarakat.
2. Kepolisian Resort Ponorogo harus lebih tegas dalam menindak anggota masyarakat atau orang-orang yang melakukan kekerasan terhadap pelaku tindak pidana untuk menghilangkan anggapan bahwa melakukan kekerasan terhadap pelaku tindak pidana merupakan suatu tindakan yang wajar dan pantas.
3. Perlunya penindakan yang lebih tegas kepada pelaku kejahatan agar nantinya dapat memberikan rasa aman serta dapan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.

## Daftar Pustaka

- Adhi Wibowo, **Perlindungan Hukum Korban Amuk Masa Suatu Tinjauan Viktimologi**, Thafa Media, Yogyakarta, 2013
- Amiruddin, Zainal Asikin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
- Chairul Huda, **Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan**, Cetakan Ketiga, Kencana, Jakarta, 2014hlm 129
- C.S.T. Kansil, **Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1989
- G.W Bawengan, **Masalah Kejahatan dengan Sebab Dan Akibat**, Pradnya Paramita, Jakarta Pusat, 1977
- Mhd. Shiddiq Tgk. Armia, **Perkembangan Pemikiran Dalam Ilmu Hukum**, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003
- Mulyana W. Kusuma, **Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982



- Nana Syaodih Sukmadinata, **Metode Penelitian Pendidikan**, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2012
- Purnianti, Moh. Kemal Darmawan, **Mazhab Dan Penggolongan Teori Dalam Kriminologi**, Aditya Bakti, Bandung, 1994
- Sabian Usman, **Dasar-Dasar Sosiologi Hukum**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009
- Satjipto Raharjo, **Hukum dan Masyarakat**, Angkasa, Bandung, 1986
- Soedjono Dirdjosisworo, **Sinopsis Kriminologi Indonesia**, Mandar Maju, Bandung, 1994
- Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Ui-Pres, Jakarta, 2010
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat**, Rajawali Press, Jakarta, 1982
- Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, **Kriminologi**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
- Wina Sanjaya, **Penelitian Pendidikan: Jenis, Metode dan Prosedur**, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2013